



**“FOCUS GROUP DISCUSSION, Transportasi Berkeadilan di Kepulauan Seribu”**

**Jakarta, 8-9 September 2020.**

Ruas jalan menuju puncak sebagai kawasan kaum urban & wisata seringkali mengalami *over capacity* dan juga memiliki beberapa potensi yang menimbulkan kemacetan khususnya pada masa weekend sehingga diperlukan *shifting* konsentrasi destinasi pariwisata untuk mengurai kepadatan. Dalam melakukan *shifting* tersebut, perlu diperhatikan segmentasi pasar sebagai akibat perbedaan kondisi geografis serta beberapa perbaikan terkait sarana-prasarana transportasi menuju kepulauan seribu yang memiliki potensi sangat besar namun harus terlebih dahulu dilakukan pengembangan dan perbaikan beberapa aspek terutama fasilitas dan prasarana transportasi perairan.

Sejauh ini dari *stakeholder* sendiri telah melakukan beberapa progress antara lain memulai kajian, pengembangan prasarana dan sarana, dan upaya lainnya. Dr. Capt. Antoni Arif Priadi, M.Sc, Direktur Lalu Lintas Angkutan Laut, Direktorat Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, memberikan gambaran Terminal Penumpang Muara Angke dimana kondisi eksisting membutuhkan perhatian khusus, guna memaksimalkan peluang pariwisata ataupun mengakomodir kebutuhan masyarakat di Kepulauan Seribu.

Bram Hertasing, ST, MTM, M.logMan, Kasubdit Lalu Lintas Transportasi, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) menyetujui adanya pengembangan Kawasan Wisata Kepulauan Seribu, diharapkan dapat mengurangi kemacetan puncak (dengan catatan sarana dan prasarana di Kepulauan Seribu dibangun dengan baik). Saat ini sendiri terdapat beberapa perusahaan swasta, bumh, ataupun dinas perhubungan yang melayani jasa penyeberangan menuju kepulauan seribu. Terjadinya pandemi covid-19 juga berimbas kepada pengurangan operasional kapal dan aktivitas pariwisata sehingga diperlukan langkah-langkah solutif dari para stakeholder. Asep Erwin Djuanda, SE. M.Si, Kepala Bidang Pembinaan dan Pembiayaan, Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI Jakarta, memberikan pandangan guna kelancaran permohonan BLUD, dari acuan permohonan ke Gubernur hingga penerapan riil.

Pembentukan BLUD transportasi perairan sebagai bentuk kolaborasi dan sinergi dengan pihak swasta tanpa mengabaikan masyarakat setempat yang didukung pula dengan kepgub 1107 tahun 2019 tentang layanan transportasi perairan terintegrasi serta dukungan dari sektor perbankan dapat menjadi alternatif solusi dalam meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat pada khususnya dan perekonomian kawasan kepulauan seribu pada umumnya. Kendala Indonesia terisolasi dari pulau utama menjadi penghambat, sehingga diperlukan fasilitas kapal antar pulau yang perlu diperhatikan bahwa menambahkan kapal yang lajal untuk ke Kepulauan Seribu. Pihak Pemasaran Kapal Penumpang dan Kapal Perintis PT. Pelni (Persero), membicarakan mengenai perencanaan trayek kapal dari Jakarta ke Kepulauan Seribu dari Sunda Kelapa, dan menyinggung perawatan dan peremajaan harus terus digalakkan. Ir. Sandry Pasambunan, Direktur Komersial dan Pengembangan usaha, Perum DAMRI menyatakan siap mendukung pemerintah, karena keputusan pemerintah adalah mutlak untuk pengembangan fasilitas ke Kepulauan Seribu. Ibrahim K. Rahman PhD., dari PT. Samudra Indonesia memberikan gambaran tentang kesenjangan GDP dan HDI antara masyarakat di pulau dan daratan, yang menjadi tantangan dalam mewujudkan transportasi berkeadilan. Bapak Rojali dari Koperasi Angkutan Laut Kepulauan Seribu (Kalbu) menyatakan siap mendukung dengan upaya meremajakan armada kapal rakyat yang selama ini melayani transportasi di kepulauan seribu

Sehingga kesimpulan yang didapat pada *Focus Group Discussion (FGD)*, Transportasi Berkeadilan di Kepulauan Seribu, sikap mendukung transportasi berkeadilan di Kepulauan Seribu. Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ), Dr. Ir. Haris Muhammadun, ATD., MM, IPM, memberikan sikap tegas guna pendirian BLUD Pelabuhan dan Pelayaran Jakarta yang akan rampung pada tahun 2021. DISHUB dan DTKJ membentuk tim kecil guna BLUD berlangsung lancar, untuk masyarakat dan kesejahteraan Kepulauan Seribu.

### **Informasi Lebih Lanjut:**

Adrianus Satrio Adi Nugroho, S. Ikom

Anggota Komisi Hukum dan Humas, Dewan Transportasi Kota Jakarta

Email : [dtkjdk@gmail.com](mailto:dtkjdk@gmail.com)

Telp: 081386860250

### **Sekretariat Dewan Transportasi Kota Jakarta**

Gedung Dinas Perumahan dan Permukiman DKI Jakarta Lt. 8, Jl. Jati Baru Raya No. 1, RT.17/RW.1, Cideng, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat,  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10150.